

Prospek keuangan daerah propinsi riau dengna berlakunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (suatu tinjauan terhadap ketahanan nasional)

Razaki Persada, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=95810&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada era reformasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reformasi total disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, telah memberikan petunjuk dan arah untuk lebih memperbaiki porsi pelaksanaan desentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah. Secara yuridis formal tuntutan tersebut telah melalui TAP MPR tahun 1999 menyangkut Otonomi Daerah yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pemimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Untuk melihat sistem hubungan keuangan pusat dan daerah yang baik dan sesuai dengan yang perlu dilihat secara umum tujuan ekonomis yaitu tercapainya stabilitas makro ekonomi dan tercapainya efisiensi kinerja pemukiman serta tujuan politiknya yaitu terpeliharanya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu jantungnya pelaksanaan otonomi daerah adalah sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dimana untuk menunjang kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing tingkat pemerintahan diperlukan sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Pendapatan Asli daerah, Dana Pemimbangan, Pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dalam penelitian ini akan diteliti persoalan bagaimanakah prospek keuangan daerah Propinsi Riau dengan berlakunya Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah jika dikaji dalam perspektif Ketahanan Nasional yang meliputi besarnya dana pemimbangan, kebutuhan dan kapasitas dana bagi pemerintah daerah Riau serta dampak berlakunya Undang-undang tersebut dalam perspektif Ketahanan Nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah di propinsi Riau, maka dengan belum keluarnya rancangan peraturan perundang-undangan (seharusnya sudah) peneliti telah Pada era reformasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reformasi total disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, telah memberikan petunjuk dan arah untuk lebih memperbaiki porsi pelaksanaan desentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah. Secara yuridis formal tuntutan tersebut telah melalui TAP MPR tahun 1999 menyangkut Otonomi Daerah yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pemimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.